

**KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM PENGAJUAN  
PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI  
(Study Yuridis Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang  
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) )**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Pada  
Program Sarjana Ilmu Hukum  
Guna Memperoleh Gelar SH



**OLEH:**

**M. ALPI SYAHRIN**  
**NIM. 10727000147**

**PROGRAM SI  
JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2011**

## ABSTRAK

### **KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI (Study Yuridis Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) )**

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang masih membuka peluang untuk mempailitkan Perusahaan Asuransi. Hanya saja yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pailit terhadap Perusahaan Asuransi adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Permasalahan yang timbul adalah: Pertama, bagaimana Aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan dan Penundaaan kewajiban Pembayaran Utang?, Kedua, bagaimana Prosedur dalam Pengajuan Pailit Perusahaan Asuransi Oleh Menteri keuangan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?, Ketiga, bagaimana perlindungan Hukum terhadap Nasabah Asuransi jika perusahaan Asuransi tersebut dipailitkan oleh Pengadilan Niaga?

Sesuai dengan Permasalahan yang ada, maka dapatlah diambil sebuah hasil, yaitu: 1). Perusahaan Asuransi sesuai dengan fungsinya yang menghimpun dan mengelola dana dari masyarakat dalam jumlah besar melalui pengambil alihan resiko yang belum dapat dipastikan maka perusahaan asuransi memegang peranan penting dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian Negara, Sehingga kepailitan pada sebuah perusahaan asuransi akan menimbulkan banyak dampak negatif dari segi perekonomian, mengingat banyak kepentingan yang terkait dengan jenis usaha yang satu ini, tidak hanya para kreditornya tetapi juga masyarakat luas dan pihak investor terutama investor asing yang tentunya akan enggan menanamkan modalnya jika terdapat ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan perasuransian. Dengan demikian adanya kewenangan Menteri Keuangan tidak boleh diartikan memiliki kewenangan memutuskan pailit atau tidaknya suatu perusahaan asuransi melainkan hanya melakukan fungsi Pengawasan dan Pembinaan agar kepentingan pemegang polis tidak menjadi korban pihak lain yang akan mengajukan pailit. Sehingga benar – benar tepat bahwa menteri keuangan yang semestinya yang mengajukan Permohonan Pailit Kepada Pengadilan Niaga berdasarkan Ajuan dari Kreditor Perusahaan Asuransi. 2). Prosedur Pengajuan Permohonan Pailit Perusahaan Asuransi diajukan Oleh Kreditor Kepada Pengadilan Niaga Melalui Mentri Keuangan, kemudian menteri keuangan yang akan mengajukan kepada pengadilan Niaga 3). jika suatu Perusahaan Asuransi telah dinyatakan pailit maka Nasabah pemegang polis Asuransi dari perusahaan Asuransi tersebut berhak mengajukan tuntutan pemenuhan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan asuransi yang bersangkutan melalui Pengadilan Negeri baik secara perdata maupun pidana.

## DAFTAR ISI

### PENGESAHAN

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>

### BAB I : PENDAHULUAN

A. LatarBelakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	13
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	18

### BAB II : TINJAUAN UMUM

A. Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor 4 tahun 1998 Tentang Kepailitan dan PKPU	
1. Pengaturan Kepailitan.....	19
2. Asas – Asas Hukum Kepailitan.....	22
3. Syarat –Syarat Pailit.....	22
4. Pihak – Pihak yang dapat dinyatakan Pailit.....	25
B. Perusahaan Asuransi Pada Umumnya	
1. Pengertian Perusahaan Asuransi	
a. Jenis Usaha perasuransian.....	26
b. Bentuk Hukum Usaha Perasuransian.....	28
c. Izin Usaha Perasuransian .....	29
2. Prinsip – Prinsip Dalam Sistem Hukum Asuransi.....	31
3. Perjanjian Asuransi.....	34
4. Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi.....	3

### **BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Tentang Kewenangan Menteri Keuangan Republik Indonesia

1. Teori Kewenangan.....39
2. Kementerian Keuangan.....45
3. Wewenang Menteri Keuangan.....46

### **BAB IV : KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI (study Yuridis Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU))**

1. Aturan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan dan PKPU.....47
2. Prosedur dalam hal Pengajuan Pailit Perusahaan Asuransi Oleh menteri Keuangan berdasarkan Undang – undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU.....55
3. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi Apabila Perusahaan Asuransi Telah dinyatakan Pailit Oleh Peradilan Niaga ...60

### **BAB V : PENUTUP**

- A. Kesimpulan.....67
- B. Saran.....68

### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kegiatan Ekonomi pada umumnya dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi baik orang perorangan yang menjalankan perusahaan atau bukan Badan Usaha, baik yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum. Kegiatan ekonomi pada hakekatnya adalah kegiatan menjalankan perusahaan yaitu, suatu kegiatan yang mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan :

1. Secara terus menerus dalam pengertian tidak terputus putus;
2. Secara terang terangan dalam pengertian yang sah (*Bukan Illegal*);
3. Dan kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan baik untuk diri sendiri atau orang lain.<sup>1</sup>

Kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat pada hakekatnya merupakan rangkaian berbagai perbuatan hukum yang banyak jenis, ragam, kualitas dan variasinya yang dilakukan oleh antar pribadi, antar perusahaan, antar negara dan antar kelompok dalam berbagai volume dengan frekuensi yang tinggi setiap saat di berbagai tempat. Mengingat dengan semakin tinggi frekuensi kegiatan ekonomi yang terjadi pada masyarakat tentunya semakin banyak pula kebutuhan akan dana sebagai salah satu faktor pendorong dalam menggerakkan roda perekonomian. Seiring

---

<sup>1</sup> Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, CV Mandarmaju, Bandung, 2000.h..4.

pesatnya perkembangan ekonomi dunia telah berdampak pada meningkatnya transaksi perdagangan antar pelaku usaha, dimana satu pelaku usaha melakukan usaha atau investasi di beberapa negara berdasarkan hukum Negara setempat.

Semakin banyak membuka usaha, maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh, begitu pula sebaliknya juga akan semakin besar pula risiko yang akan ditanggung kalau seandainya usaha yang dilakukan itu gagal.

Lembaga atau institusi yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih risiko pihak lain ialah lembaga asuransi. Asuransi atau pertanggungan, di dalamnya selalu mengandung pengertian adanya suatu risiko. Risiko termaksud terjadinya adalah belum pasti karena masih tergantung pada suatu peristiwa yang belum pasti pula. Hal ini, dalam praktek juga secara tegas diakui, antara lain dalam naskahnya Dewan Asuransi Indonesia dalam kertas kerjanya dalam simposium Hukum Asuransi sebagai berikut:

Asuransi atau pertanggungan, di dalamnya tersirat pengertian adanya suatu risiko, yang terjadi belum dapat dipastikan, dan adanya pelimpahan tanggung jawab memikul beban risiko tersebut kepada pihak lain yang sanggup mengambil alih tanggung jawab. Sebagai kontra prestasi dari pihak lain yang melimpahkan tanggung jawab ini, ia diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menerima pelimpahan tanggung jawab.<sup>2</sup>

Krisis moneter yang melanda hampir di seluruh belahan dunia pada pertengahan tahun 1997 telah memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian. Dunia usaha merupakan dunia yang paling menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah melanda. Negara kita memang tidak sendirian dalam menghadapi krisis tersebut, namun tidak dapat dipungkiri bahwa negara kita

---

<sup>2</sup> *Ibid.* h. 12

adalah salah satu negara yang paling menderita dan merasakan akibatnya. Selanjutnya tidak sedikit dunia usaha yang gulung tikar, sedangkan yang masih dapat bertahan pun hidupnya menderita.<sup>3</sup>

Terpuruknya kehidupan perekonomian nasional, semakin banyak usaha yang tidak dapat meneruskan usaha nya termasuk memenuhi kewajiban nya pada kreditor. Maka diperlukan aturan hukum yang jelas dan sempurna yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kepailitan. *International Monetary Fund* (IMF) mendesak agar pemerintah RI segera mengganti atau merubah peraturan kepailitan yang berlaku, yaitu *Faillissement Voerordering* (FV) sebagai sarana agar utang-utang pengusaha di Indonesia dapat segera diselesaikan.<sup>4</sup> Kepailitan dan penundaan atau pengunduran pembayaran lazimnya dikaitkan dengan masalah utang piutang antara seseorang yang dapat disebut Debitor (sekarang melalui Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebut Debitor) dengan mereka yang mempunyai dana yang disebut Kreditor/Kreditur. Dalam peraturan lama (baca: FV), para kreditor yang memegang jaminan berhak menjual jaminan tanpa terpengaruh walaupun debitor dinyatakan pailit.<sup>5</sup> Dengan kata lain, antara Debitor dan Kreditor terjadi perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam uang. Akibat dari perjanjian pinjam meminjam uang tersebut, lahirlah suatu perikatan di antara pihak. Dengan adanya perikatan maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban dari Debitor adalah

---

<sup>3</sup> Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta), 2004, h. 1

<sup>4</sup> Sudargo Gautama, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*, (1998), cet.1, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1998), h. 1

<sup>5</sup> Retno Wulan Sutantio, “*Pengadilan Niaga, Kurator, dan Hakim Pengawas, Tugas, dan Wewenang*” , (makalah pada seminar Perlindungan Debitor dan Kreditor dalam Kepailitan, UNPAD, 17 Okt. 1998), h. 1

mengembalikan utangnya sebagai suatu prestasi yang harus dilakukan. Apabila kewajiban mengembalikan utang tersebut lancar sesuai dengan perjanjian tentu tidak merupakan masalah. Permasalahan akan timbul apabila Debitor mengalami kesulitan untuk mengembalikan utangnya tersebut. Dengan kata lain Debitor berhenti membayar utangnya. Keadaan berhenti membayar utang dapat terjadi karena :

1. Tidak mampu membayar;
2. Tidak mau membayar.

Kepailitan merupakan sitaan umum yang mencakup seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditor. Menurut Sri Redjeki Hartono.<sup>6</sup>

“Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar”

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, di mana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut pada kreditornya. Sehingga, bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitor tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitor tersebut memang telah

---

<sup>6</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan*, (MandarMaju, 1999, Bandung) , h. 16



tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for bankruptcy*).<sup>7</sup>

Asuransi juga menghimpun dana dari masyarakat untuk mengatasi kerugian-kerugian yang tidak tentu. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,<sup>8</sup> masih membuka peluang untuk mempailitkan Perusahaan Asuransi. Hanya yang memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pailit terhadap Perusahaan Asuransi adalah Menteri Keuangan (Pasal 2 ayat 5 UU 37 Tahun 2004).

Ada perkembangan pengaturan mengenai kepailitan terhadap perusahaan asuransi, khususnya mengenai "*legal standing*" pemohon pailit perusahaan asuransi. Pada waktu berlakunya Peraturan Kepailitan (*faiilesement ordonansi*) dan juga setelah berlakunya UU 4 Tahun 1998, perusahaan asuransi diperlakukan sama dengan perusahaan privat lainnya. yang berarti perusahaan asuransi dapat diajukan permohonan pailit oleh kreditor siapapun maupun debitor sendiri. pada saat berlakunya peraturan ini, banyak perusahaan asuransi besar yang dinyatakan pailit oleh pengadilan atas permohonan nasabah asuransi maupun pihak lain, misalnya asuransi Wataka (Pengadilan Niaga pailit, di kasasi dibatalkan), asuransi Manulife (Pengadilan Niaga pailit, di kasasi dibatalkan), asuransi Prudential (di Pengadilan Niaga pailit, kemudian di Kasasi di batalkan).

---

<sup>7</sup> Ricardo Simanjuntak, "Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan", Dalam : Emmy Yuhassarie (ed.), *Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya*, (Pusat pengkajianHukum, Jakarta, 2005), h .55-56.

<sup>8</sup> Penulis akan lebih Sering Menggunakan kata – kata Penundaaan kewajiban Pembayaran Utang dengan Singkatan PKPU

Pada pertengahan tahun 1999 untuk pertama kalinya sebuah perusahaan asuransi dimohon untuk dinyatakan pailit oleh para Kreditornya sejak adanya Pengadilan Niaga yang didirikan berdasarkan Undang-undang kepailitan Nomor 4 Tahun 1998. Kejadian yang membawa pengaruh buruk bagi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap manfaat Perusahaan Asuransi, adalah adanya putusan Kontroversi yang dijatuhkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.10/pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 13 juni 2002 terhadap perusahaan asuransi PT.Asuransi jiwa Manulife (PT.AJMI) telah banyak memicu reaksi keras, diantaranya karena putusan pailit tersebut dijatuhkan terhadap suatu perusahaan yang masih *solvent* (dinyatakan sehat dan adanya kesanggupan membayar utang), dinyatakan pailit oleh pengadilan hanya didasarkan bahwa perusahaan tersebut tidak mampu membayar kewajibannya kepada salah satu kreditor.

PT.AJMI adalah suatu perusahaan asuransi yang didirikan oleh *Manulife Financial Corporation (Manulife)* dari Kanada dengan saham 51 %, Dharmala Sakti Sejahtera, TBK. Dengan saham 40% dan *International Finance Corporation (IFC)* dengan saham sebesar 9%. *Manulife* adalah perusahaan publik yang besar di Kanada, sedangkan IFC adalah suatu perusahaan milik dana pensiun karyawan *World Bank*. Permohonan kepailitan PT.AJMI diajukan oleh PT.Dharmala Sakti Sejahtera, TBK (PT.DSS), dengan alasan tidak membayar deviden keuntungan perusahaan tahun 1998. PT.AJMI dimohonkan melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk dinyatakan pailit oleh PT.DSS yang pada tahun 1998 memiliki 40% saham PT.AJMI, sesudah PT.DSS pailit, saham PT.AJMI miliknya dilelang dan

dibeli oleh Manulife.<sup>9</sup> Alasan PT.DSS mempailitkan PT.AJMI adalah dengan dinyatakan PT.AJMI pailit, segala sesuatu yang menyangkut pengurusan harta kekayaan PT.DSS (sebagai debitor pailit) sepenuhnya dilakukan oleh Kurator. Argumen PT.DSS untuk mempailitkan PT.AJMI adalah sesuai Pasal X akta perjanjian usaha patungan, diantara pemegang saham, dalam mendirikan PT.AJMI. telah disepakati bahwa:

“sejumlah perusahaan memperoleh laba dan telah mendapatkan suatu surplus untuk dibagikan kepada para pemegang saham untuk tahun pembukuan perusahaan yang manapun (sebagaimana dapat dilihat dari laporan keuangan yang telah diaudit sehubungan dengan tahun pembukuan yang bersangkutan), semua pihak akan mengatur agar perusahaan (PT.AJMI) membayar deviden sedikitnya sama dengan 30 persen dari jumlah surplus yang melebihi Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) secepat mungkin dianggap praktis setelah laporan demikian dibuat”.<sup>10</sup>

Perjanjian asuransi terjadi seketika setelah tercapai kesepakatan antara tertanggung dan penanggung, hak dan kewajiban timbal balik timbul sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani (Pasal 257 ayat (1) KUHD). Asuransi tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut Polis (Pasal 255 KUHD). Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi (Pasal 258 ayat (1) KUHD). Perjanjian asuransi juga harus memenuhi syarat-syarat Umum, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikat diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;

---

<sup>9</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Faillissementsverordening juncto Undang-undang No.4 Tahun 1998*, (Grafiti, Jakarta, 2002), h. 75.

<sup>10</sup> Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan;Perusahaan; dan Asuransi*, (PTAlumni, Bandung, 2007), h.2-3.

4. Suatu sebab yang halal.<sup>11</sup>

Disamping syarat umum, terdapat syarat khusus yaitu:

1. Asas kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest principle*);
2. Asas kejujuran yang sempurna (*utmost good faith principle*);
3. Asas indemnitas (*indemnity principle*);
4. Asas subrogasi (*subrogation principle*).<sup>12</sup>

Setiap perjanjian yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara (termasuk perjanjian asuransi diberi akibat hukum menurut Pasal 1321 s/d Pasal 1329 KUHPerdara). Pemegang polis yang berpendapat bahwa terjadinya perjanjian asuransi karena adanya kesesatan, paksaan dan penipuan (*dwaling, dwang, bedrog*) dari penanggung dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian asuransi kepada pengadilan.

Disebabkan hal-hal tersebut (yang harus dibuktikannya) bertentangan dengan syarat kata sepakat Pasal 1320 KUHPerdara. Apabila perjanjian asuransi tersebut dinyatakan batal baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian dan tertanggung/pemegang polis beritikad baik, maka pemegang polis tersebut berhak menuntut pengembalian premi yang sudah dibayarkannya (*premi restorno* Pasal 281 KUHD). Kalau perusahaan asuransi wanprestasi tidak membayar klaim, yang bisa dilakukan oleh nasabah asuransi yaitu dengan meminta pertolongan pada Badan Mediasi Asuransi Indonesia dan melalui *alternatif dispute resolution/ADR*.

---

<sup>11</sup> Subekti, *Kitab Undang –undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramitha, 2004), Bab IX, P asal 258

<sup>12</sup> *Kitab undang-undang Hukum Dagang*, (Redhbook Publisher, 2008), Bab II, Pasal 1320, h. 75

Secara umum pengertian perjanjian dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut :

1. Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih;
2. Suatu hubungan hukum antara pihak, atas dasar mana pihak yang satu (yang berpiutang/Kreditor) berhak untuk suatu prestasi dari yang lain. (yang berhubungan/debitor) yang juga berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab atas suatu prestasi.

Dari batasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian pada dasarnya akan meliputi hal-hal tersebut di bawah ini :

1. Perjanjian selalu menciptakan hubungan hukum;
2. Perjanjian menunjukkan adanya kemampuan atau kewenangan menurut hukum;
3. Perjanjian mempunyai atau berisikan suatu tujuan, bahwa pihak yang satu akan memperoleh dari pihak lain suatu prestasi yang mungkin memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
4. Dalam setiap perjanjian, Kreditor berhak atas prestasi dari debitor, yang dengan sukarela akan memenuhinya;
5. Bahwa dalam setiap perjanjian debitor wajib dan bertanggung jawab melakukan prestasinya sesuai dengan isi perjanjian. Jadi perjanjian asuransi itu diadakan dengan maksud untuk memperoleh suatu kepastian atas kembalinya keadaan (ekonomi) sesuai dengan semula sebelum terjadi peristiwa.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Sri Redjeki hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Op.Cit. h.82-83.

Salah satu ketidaksempurnaan dalam UU No.4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan adalah menyangkut ketentuan apakah perusahaan asuransi sebagai salah satu perusahaan dapat dipailitkan Pengadilan Niaga atau tidak, Hal ini berbeda dengan Bank dan Perusahaan Efek yang mendapat suatu perlakuan khusus dalam pasal undang-undang tersebut. Terhadap kepailitan perusahaan asuransi, terdapat ketentuan khusus yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-undang No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian (UU No.2 Tahun 1992), yang selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Perasuransian yang menentukan bahwa yang dapat meminta kepada Pengadilan agar perusahaan asuransi dinyatakan pailit adalah Menteri Keuangan. Konsep Undang-undang No.2 Tahun 1992 yang menyatakan perusahaan asuransi hanya dapat dipailitkan Menteri Keuangan adalah karena perusahaan asuransi merupakan perusahaan jasa yang menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai kemiripan sifat dengan Bank dan Perusahaan Efek.<sup>14</sup>

Dengan demikian, apabila perusahaan asuransi dapat dipailitkan menurut Undang-undang No.4 Tahun 1998, seharusnya perusahaan asuransi juga tercantum sebagai obyek yang dapat dimintakan pailit sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.4 Tahun 1998 di dalam suatu prosedur yang sama dengan Bank dan Perusahaan Efek. Di dalam Undang-undang No.4 Tahun 1998, wewenang Menteri Keuangan ini tidak tercantum. Undang-undang tersebut tidak secara eksplisit memberikan definisi siapa yang dapat mengajukan permohonan kepailitan. Walaupun relatif baru untuk diundangkan, ternyata Undang-undang

---

<sup>14</sup> Bagus Irawan, *Op.Cit.*h.6

No.4 Tahun 1998 dinilai banyak kalangan memiliki banyak kelemahan dan tidak menciptakan kepastian hukum bagi dunia usaha.

Setelah berlakunya UU 37 tahun 2004 (tantang kepailitan dan PKPU) perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang bisa dipailitkan akan tetapi yang berwenang mengajukan permohonan pailit hanya Menteri keuangan. Mengapa perusahaan asuransi ini hanya oleh Menteri keuangan saja yang bisa mengajukan permohonan pailit?, inilah yang menarik untuk diteliti, apa ratio legis (ratio pengaturan) sampai muncul ketentuan Pasal 2 ayat 5 UU 37 tahun 2004. Kedudukan para nasabah asuransi. khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap para nasabah terutama berkaitan dengan klaim mereka, dapat diperhatikan dari perjanjian asuransi. Asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian, oleh karena itu perjanjian itu sendiri perlu dikaji sebagai acuan menuju pada pengertian perjanjian asuransi. Disamping itu karena acuan pokok perjanjian asuransi tetap pada pengertian dasar dari perjanjian.

Jika Perusahaan asuransi tersebut dipailitkan, maka ada hal – hal yang mesti dilakukan yang diatur dalam undang – undang Kepailitan dan PKPU, Yaitu:

“Semua kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing - masing kepada kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau tulisannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda”.<sup>15</sup>

Berdasarkan kenyataan diatas, dalam rangka pemailitan Perusahaan Asuransi dan Bank maka diperlukan suatu pendekatan yang berorientasi kebijakan

---

<sup>15</sup> Undang – undang 37 Tahun 2004, Pasal 115.( Redhbook Pubhlisher, 2008), h. 275

hukum Kepailitan. Kebijakan penanggulangan dengan hukum kepailitan adalah merupakan usaha yang rasional dalam rangka menanggulangi pemailitan Perusahaan Asuransi. Sebagai kebijakan yang rasional maka kebijakan tersebut harus berhubungan dengan kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalisasikan peraturan perundan - gundangan hukum kepailitan yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah pemailitan Perusahaan Asuransi.

Selain itu juga yang harus dikaji adalah bagaimana kebijakan formatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum kepailitan yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peraturan pada undang-undang hukum kepailitan (berkaitan pula dengan konsep Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang baru) yang tepatnya dalam rangka menanggulangi pemailitan Perusahaan Asuransi pada masa mendatang.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas tentang **Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Pengajuan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi (Study Yuridis Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU)).**

## **B. Batasan Masalah**

Definisi kewenangan Adalah:



Kewenangan adalah kekuasaan yang mendapatkan keabsahan atau legitimasi<sup>16</sup>

Kewenangan adalah hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik<sup>17</sup>

Jadi yang menjadi fokus atau batasan masalahnya adalah mengenai Kewenangan Menteri keuangan Republik Indonesia dalam pengajuan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi berdasarkan Undang – undang nomor 37 tahun 2004.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Aturan Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan PKPU?
2. Bagaimana Prosedur Dalam Hal Pengajuan Pailit Perusahaan Asuransi Oleh Menteri Keuangan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi Apabila Perusahaan Asuransi Telah dinyatakan Pailit Oleh Peradilan Niaga?

### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

---

<sup>16</sup> Uwes Fatoni, *Kewenangan dan Legitimasi*, 8 Januari 2011, <http://www.pengantarilmupolitik.blogspot.com>. (20.30)

<sup>17</sup> Ibid h.1

1. Untuk Mengetahui isi Undang – Undang nomor 37 Tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan dan PKPU.
2. Untuk Mengetahui Prosedur Pengajuan Pailit Perusahaan Asuransi Oleh Menteri Keuangan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
3. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi Apabila Perusahaan Asuransi Telah dinyatakan Pailit Oleh Peradilan Niaga.

Sedangkan manfaat yang diharapkan penulis dari hasil penelitian ini yaitu antara lain :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan peneliti tentang hukum bisnis, khususnya dalam hal hukum Kepailitan dan juga Hukum Asuransi.
2. Untuk menambah bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian terhadap ruang lingkup yang sama.
3. Sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Strata Satu Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder

dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder<sup>18</sup>. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu untuk menggambarkan seteliti mungkin terhadap hal – hal yang akan diteliti.

## 2. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu dalam penelitian ini adalah Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Undang – Undang nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan dan PKPU
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku serta literatur yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, yaitu buku – buku Tentang Kepailitan, Perusahaan, Perasuransian, dan hal – hal lain yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti.
- c. Bahan Hukum Tertier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus, tulisan tentang laporan-laporan dan jurnal dan website tentang Masalah yang diteliti.

## 3. Analisis Pengumpulan Data

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta; Rajawali, , 1985), h. 15.

1. Mengumpulkan semua Buku – buku atau Literatur, baik Primer, Sekunder ataupun tersier yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.
  2. Menela'ah bahan – bahan tersebut dan kemudian mencatatnya dalam lembaran khusus sesuai dengan masalah Penelitian.
  3. Merekonstruksikan atau mengklasifikasikan catatan – catatan tersebut berdasarkan ategori yang mengacu pada masalah penelitian.
4. Analisa Data

Setelah Data – data terkumpul melalui tahapan – tahapan Pengumpulan Data Tersebut, selanjutnya dianalisa dengan tekhnik analisis isi atau konten analisis, yakni mempelajari ketentuan Undang – undang dengan pendekatan Kosa Kata, Pola Kalimat, Latar Belakang Situasi Atau Budaya yang berkembang terkait masalah Undang – Undang tersebut.

Data Dianalisis secara normatif-kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas – asas dan informasi baru.

#### 5. Teknik Penulisan

Adapun cara penulis mengambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah berpedoman pada:

1. Deduktif , yaitu penyimpulan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.
2. Induktif, secara induktif merupakan suatu rekayasa dari berbagai macam kasus yang unik atau khusus yang kemudian dikembangkan menjadi suatu penalaran tunggal yang menggabungkan kasus-kasus khusus tersebut kedalam suatu bentuk pemahaman yang umum.
3. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data, kemudian menyusun, menjelaskan dan menganalisa.

## **F. Sistematika Penulisan**

Adapun dalam penulisan ini, penulis menyajikan dan memakai sistematika

V BAB yaitu :

BAB I : Pendahuluan yang berisi latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum yang berisi tentang Undang – Undang Nomor 37 tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan PKPU, Kewenangan menteri keuangan Berdasarkan Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, Tinjauan Tentang Asuransi Pada Umumnya.

BAB III : Tinjauan Teoritis tentang kewenangan Menteri Keuangan.

BAB IV: Hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi tentang Aturan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004, Aturan Undang – Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang kepailitan dan PKPU, Tentang Prosedur Pengajuan Pailit Perusahaan Asuransi Oleh Menteri Keuangan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004, Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Asuransi Apabila Perusahaan Asuransi telah dinyatakan Pailit Oleh Peradilan Niaga.

BAB V: Terdiri dari Kesimpulan dan saran



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. UNDANG – UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU.**

##### **1. Pengaturan Kepailitan**

Dalam Undang – undang Nomor 4 tahun 1998, tidak ada definisi yang jelas mengenai kepailitan, dalam Pasal 1 Undang – undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan hanya menyebutkan:

- a. Debitur yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.
- a. Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 (satu), dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.
- b. Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- c. Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh badan pengawas pasar Modal

Jika dicermati pasal 1 undang – undang Kepailitan dan penundaan pembayaran Nomor 4 tahun 1998 diatas, tampaknya pembentuk Undang –



undang hanya menyebutkan criteria seseorang dapat dinyatakan pailit, yakni debitur mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Selain itu dalam pasal 1 (satu) di atas dikemukakan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan pailit adalah:

- 1) Debitur
- 2) Kreditur
- 3) Jaksa demi kepentingan Umum
- 4) Pimpinan Bank Indonesia, menyangkut Bank
- 5) Ketua Badan pengawas Pasar Modal, menyangkut pasar Modal.<sup>1</sup>

Kartini Muljadi juga menyatakan bahwa kalau diteliti, sebetulnya peraturan kepailitan dalam UUK itu adalah penjabaran Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, karenanya :

- a. Kepailitan hanya meliputi harta pailit dan bukan debitornya;
- b. Debitor tetap pemilik kekayaannya dan merupakan pihak yang berhak atasnya, tetapi tidak lagi berhak menguasainya atau menggunakannya atau memindahkan haknya atau mengagungkannya;
- c. Sitaan konservator secara umum meliputi seluruh harta pailit.<sup>2</sup>

Dapat dilakukan penyitaan terhadap harta benda atau kekayaan Debitor pailit, Yaitu: “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan

---

<sup>1</sup> Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1998,(Redhbook Pubhlisher, 2001), , Pasal 1

<sup>2</sup> Kartini Muljadi, *Actio Paulina dan Pokok-pokok tentang Pengadilan Niaga*, dalam: Rudhy A.Lontoh et.al, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Alumni, Bandung, 2001), h. 300.

pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan“<sup>3</sup>

Ketentuan Pasal 21 UUKPKPU hampir senada dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPdata, hanya ketentuan Pasal 1131 KUHPdata lebih luas karena mencakup harta yang ada dan yang akan ada di kemudian hari, sedangkan dalam Pasal 21 UUKPKPU hanya kekayaan pada saat putusan pernyataan pailit saja.

Ketentuan Pasal 21 UUKPKPU di atas juga dapat dibandingkan dengan Pasal 19 FV yang berbunyi :“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Si berutang pada saat pernyataan pailit, beserta segala apa yang diperoleh selama kepailitan“.

Pada dasarnya, ketentuan Pasal 21 UUKPKPU tidak berbeda dengan ketentuan Pasal 19 FV. Oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, Pasal 19 FV tersebut tidak dihapuskan yang berarti semasa Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, Pasal 19 FV tetap berlaku.

Hukum kepailitan di Indonesia sebelumnya diatur dalam Undang - Undang tentang Kepailitan (*Faillissements Verordening Staatsblad 1905:207 jo Staatsblad 1906:348*) yang merupakan peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintah Hindia Belanda. Dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat untuk penyelesaian utang piutang, sehingga kemudian oleh pemerintah Indonesia diperbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 dan terakhir telah diperbaharui oleh Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (UUKPKPU).

---

<sup>3</sup> Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 21

## **2. Asas-asas Hukum Kepailitan**

Pengertian Kepailitan menurut Undang - undang Kepailitan 2004 sebagai berikut :

”Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang undang ini.”<sup>4</sup>

## **3. Syarat – Syarat pailit**

Sangat penting diketahui mengenai apa saja syarat – syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu apabila seseorang atau suatu badan hukum bermaksud mengajukan permohonan pernyataan pailit melalui pengadilan Niaga. Syarat – syarat tersebut perlu diketahui karena apabila permohonan kepailitan tidak memenuhi syarat – syarat tersebut, maka permohonan tersebut tidak akan dikabulkan oleh pengadilan niaga, Yaitu:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditur”<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Loc Cit, Undang –undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 1 sub angka 1*

<sup>5</sup> *Op Cit, Undang –undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 2 sub angka 1*

Dari ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang – undang kepailitan, dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitur hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat – syarat sebagai berikut:

- a) Debitur terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditur, atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditur.
- b) Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satu krediturnya.
- c) Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.

Pasal 2 ayat (1) ini merupakan perubahan terhadap syarat kepailitan yang ditentukan dalam pasal 1 (1) *Fallissementsverordening*. Untuk membandingkannya, dibawah ini dikutipkan pasal 1 (1) *Fallissements verordening* sebagai berikut:

” Setiap Debitur yang tidak mampu membayar utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang tersebut, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang kreditur atau beberapa orang krediturnya, dapat diadakan putusan oleh hakim yang menyatakan bahwa debitur yang bersangkutan dalam keadaan pailit”

Syarat keharusan adanya dua atau lebih kreditur disebut sebagai *Concucus creditorium*, yang mana merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 1132 kitab Undang – undang Hukum Perdata. Alasannya adalah bahwa tidak ada keperluan untuk membagi asset debitur diantara para kreditur. Kreditur berhak dalam perkara ini atas semua asset debitur. Dalam hal kepailitan yang terjadi sebenarnya sita umum terhadap semua harta kekayaan debitur yang diikuti likuidasi paksa,

untuk dibagi secara prorata diantar krediturnya, kecuali diantara kreditur harus didahulukan menurut ketentuan pasal 1132 Kitab undang – undang hukum Perdata.

Selain dari persyaratan dua atau lebih kreditur, syarat yang lain adalah harus adanya utang. Yang mana utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang – undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi member hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Sedangkan syarat yang lain adalah jangka waktu dan dapat ditagih yang mana istilah “jatuh waktu” dan “dapat ditagih” memiliki makna yang berbeda. Suatu utang dapat ditagih tetapi belum waktunya. Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya menjadi utang yang telah dapat ditagih, namun utang yang dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu. Utang hanyalah jatuh waktu apabila menurut perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh debitur sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.

Berkenaan dengan syarat – syarat diatas, maka begitu sederhananya sifat dari pemeriksaan kepailitan, oleh karena itu tentunya diharapkan sifat yang aktif dari hakim untuk sedapat mungkin mendengar secara seksama kedua belah pihak (debitur dan kreditur) dimuka persidangan dan berusaha mendamaikan diantara mereka. Dengan demikian, maka akan dapat dicegah kemungkinan dijatuhkannya

putusan kepailitan, yang sesungguhnya kurang dapat dipertanggungjawabkan dan berlarut – larut, dan ditegaskan bahwa:

“Putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pailit didaftarkan”<sup>6</sup>

#### 1. **Pihak – pihak yang dapat dinyatakan Pailit**

Yang menjadi Objek Undang – undang kepailitan adalah Debitur, yaitu debitur yang tidak membayar utang – utangnya kepada para krediturnya. Undang – undang di berbagai Negara di dunia membedakan secara jelas dan tegas mengenai aturan kepailitan bagi debitur perorangan (*person*) dan debitur bukan perorangan atau badan hukum (*rechts person*).

Didalam Undang – undang Kepailitan yang baru, yaitu Nomor 37 tahun 2004 hanya memberikan definisi mengenai debitur dan debitur pailit yang dijabarkan dalam pasal 1 ayat (3) dan (4) yang berbunyi :

“Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang – undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan”

“Debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan”

Secara umum pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut:

1. Orang perorangan, baik laki – laki maupun perempuan yang telah menikah maupun yang belum menikah. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh debitur perorangan yang telah menikah, maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami

---

<sup>6</sup> *Op Cit, Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 8 sub angka 5*

atau istrinya, kecuali antara suami istri tersebut tidak ada pencampuran harta.

2. Perserikatan – perserikatan dan perkumpulan – perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya. Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat kediaman masing – masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.
3. Perseroan – perseroan, perkumpulan – perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum. Dalam hal ini berlakulah ketentuan mengenai kewenangan masing – masing badan hukum sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya.
4. Balai Harta Peninggalan

## **B. PERUSAHAAN ASURANSI PADA UMUMNYA**

### **1. PENGERTIAN PERUSAHAAN ASURANSI**

#### **a) Jenis Usaha Perasuransian**

Sebelum masuk ke Perusahaan Asuransi, ada baiknya dilihat dulu beberapa definisi tentang asuransi dan Perusahaan.

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh Premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat di derita karena suatu Peristiwa yang tidak pasti.<sup>7</sup>

Perusahaan ialah suatu tempat untuk melakukan kegiatan proses produksi barang atau jasa. Hal ini disebabkan karena ‘ kebutuhan ‘ manusia tidak bisa digunakan secara langsung dan harus melewati sebuah ‘ proses ‘ di suatu tempat,

---

<sup>7</sup> *Op cit*, Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (*Wetboek Van Koophandel*), Pasal 246

sehingga inti dari perusahaan ialah ‘ tempat melakukan proses ‘ sampai bisa langsung digunakan oleh manusia.<sup>8</sup>

Istilah perasuransian melingkupi kegiatan usaha yang bergerak di bidang usaha asuransi dan usaha penunjang usaha asuransi. Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 menentukan:

“Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang”.

Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 menentukan:

“Usaha penunjang usaha asuransi adalah yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi, dan jasa aktuarial.”

Dalam pasal 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Usaha asuransi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa tidak pasti.
- b. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

---

<sup>8</sup>Shadia Share, *Pengertian Perusahaan* <http://syadiashare.com/pengertian-perusahaan.html>, 8 Januari 2011 (22.20)



- c. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam asuransi utang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa.

**b) Bentuk Hukum Usaha Perasuransian**

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk:

- a. Perusahaan Perseroan (Persero)
- b. Koperasi
- c. Perseroan Terbatas (PT)
- d. Usaha Bersama (Mutual)

Namun, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) usaha konsultan aktuarial dan usaha agen asuransi dapat dilakukan oleh Perusahaan Perseorangan (ayat (2)). Mengenai bentuk Usaha Bersama diatur lebih lanjut dengan undang-undang (ayat (3)). Mengingat undang-undang mengenai bentuk hukum Usaha Bersama belum ada, maka untuk sementara ketentuan mengenai bentuk hukum ini akan diatur dengan peraturan pemerintah. Akan tetapi, sayangnya hingga sekarang peraturan pemerintah tersebut belum ada.

Apabila badan hukum yang menjalankan usaha perasuransian itu berbentuk Perseroan Terbatas dan atau Perusahaan Perseroan (Persero), maka pendiriannya harus mengikuti ketentuan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Khusus badan hukum Perusahaan Perseroan (Persero) perlu mengikuti juga ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998

tentang Perusahaan Perseroan (Persero). Apabila badan hukum itu berbentuk Koperasi, maka untuk memperoleh status badan hukum itu Koperasi pendiriannya harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

**c) Izin Usaha Perasuransian**

Setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib memperoleh Izin usaha dari Menteri Keuangan, kecuali bagi perusahaan yang menyelenggarakan Program Asuransi Sosial (Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992). Khusus bagi Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan Program Asuransi Sosial, fungsi dan tugas sebagai penyelenggara program tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah. Ini berarti bahwa pemerintah memang menugaskan Badan Usaha Milik Negara yang bersangkutan untuk melaksanakan suatu Program Asuransi Sosial yang telah diputuskan untuk dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, bagi Badan Usaha Milik Negara yang dimaksud tidak perlu memperoleh izin dari Menteri Keuangan.<sup>9</sup>

Untuk mendapatkan ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dipenuhi persyaratan mengenai:<sup>10</sup>

- 1) Anggaran Dasar
- 2) Susunan Organisasi
- 3) Permodalan

---

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002), h. 26

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, h. 27.

- 4) Kepemilikan
- 5) Keahlian di bidang perasuransian
- 6) Kelayakan rencana kerja
- 7) Hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha perasuransian secara sehat (Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992).

Pemberian izin usaha perasuransian dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap pertama pemberian persetujuan prinsip dan tahap kedua pemberian izin usaha. Akan tetapi, persetujuan prinsip bagi agen asuransi dan konsultan aktuarial tidak diperlukan. Persetujuan prinsip berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal izin usaha ditetapkan, perusahaan perasuransian yang bersangkutan tidak menjalankan kegiatan usahanya, maka izin usaha perasuransian dapat dicabut (pasal 9 – pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992).

## **2. PRINSIP-PRINSIP DALAM SISTEM HUKUM ASURANSI**

Berbagai aspek hukum yang dapat timbul dalam kesepakatan pertanggungan risiko, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Aspek hukum bersifat *promissory* atau ikatan hak, dan atau kewajiban pertanggungan tertentu atas suatu risiko tersebut dinyatakan benar sepanjang waktu;
- 2) Aspek hukum yang bersifat *affirmative* atau ikatan hak, dan atau kewajiban pertanggungan tertentu atas suatu risiko tersebut dinyatakan benar pada waktu sekarang tetapi belum tentu pada waktu mendatang.

Asuransi suatu perjanjian dilengkapi juga dengan beberapa prinsip. Hal ini supaya sistem perjanjian asuransi itu dapat dipelihara dan dipertahankan, sebab suatu norma tanpa dilengkapi dengan prinsip cenderung untuk tidak mempunyai kekuatan mengikat. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem hukum asuransi tersebut antara lain:<sup>11</sup>

#### **A. Prinsip Kepentingan yang dapat diasuransikan (*Insurable Interest*)**

Prinsip ini dijabarkan dalam Pasal 250 KUHD yang menentukan bahwa:

“Apabila seorang yang telah mengadakan pertanggungan untuk diri sendiri atau apabila seorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi”.<sup>12</sup>

Secara luas dapat dikatakan bahwa seseorang yang mempunyai hak berarti mempunyai kepentingan yaitu kepentingan terlaksananya hak itu yang juga berarti pemenuhan kewajiban yang dibebankan kepada pihak lain. Prinsip “kepentingan yang dapat diasuransikan” merupakan dasar dari struktur asuransi. Syarat ini menunjukkan perbedaan hukum antara usaha asuransi dengan taruhan pada balapan kuda. Sebagai contoh, asuransi jiwa dalam Pasal 264 UU KUHD menentukan bahwa asuransi dapat diadakan tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri melainkan juga untuk kepentingan orang ketiga.<sup>13</sup>

#### **B. Prinsip Itikad Baik**

---

<sup>11</sup> Man Sastrawidjaja, dan Endang, *Hukum Asuransi*, Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian, Penerbit Alumni, Bandung, 2004, h. 55.

<sup>12</sup> *Loc Cit*, *Kitab Undang – Undang Hukum dagang, Pasal 250*

<sup>13</sup> A. Hasyimi Ali, *Pengantar Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002 h. 85.

Dalam perjanjian asuransi unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung itu sangat penting. Penanggung percaya bahwa tertanggung akan memberikan segala keterangan dengan benar. Di lain pihak tertanggung juga percaya kalau terjadi peristiwa, penanggung akan membayar ganti rugi. Saling percaya ini pada dasarnya adalah itikad baik. Prinsip itikad baik harus dilaksanakan dalam setiap perjanjian (Pasal 1338 ayat 3 KUHPERDATA) termasuk dalam perjanjian asuransi.

### **C. Prinsip Keseimbangan**

Asuransi sebagaimana dapat disimpulkan dari Pasal 246 KUHD merupakan penggantian kerugian. Ganti rugi di sini mengandung arti bahwa penggantian kerugian dari penanggung harus seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh tertanggung. Keseimbangan yang demikianlah yang dinamakan prinsip keseimbangan. Salah satu contohnya pada Pasal 252 KUHD.<sup>14</sup>

### **D. Prinsip Subrogasi**

Apabila peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya itu dalam perjanjian asuransi terjadi, maka tertanggung dapat menuntut penanggung untuk memberikan ganti rugi. Akan tetapi apabila sebab terjadinya kerugian itu diakibatkan oleh pihak ketiga maka berarti tertanggung itu dapat menuntut penggantian kerugian dari 2 sumber. Sumber pertama dari penanggung serta sumber kedua dari pihak ketiga. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan-

---

<sup>14</sup> H. Man Sastrawidjaja, *Op.Cit*, h. 5

penyimpangan seperti di atas, undang-undang mengaturnya yaitu dalam Pasal 284 KUHD.

Dengan adanya ketentuan demikian berarti secara otomatis berdasarkan undang-undang, apabila terjadi kerugian yang menimpa tertanggung oleh pihak ketiga, maka penanggung dapat menggantikan kedudukan tertanggung untuk melaksanakan hak-haknya terhadap pihak ketiga tersebut.

#### **E. Prinsip Sebab- Akibat**

Timbulnya kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian kepada tertanggung apabila peristiwa yang menjadi sebab timbulnya kerugian itu disebutkan dalam Polis. Akan tetapi tidaklah mudah untuk menentukan suatu peristiwa itu merupakan sebab timbulnya kerugian, sehingga timbulnya kerugian yang dijamin oleh Polis. Terlebih-lebih apabila peristiwa itu merupakan sebab timbulnya kerugian, sehingga dapat ditentukan, apakah hal tersebut masuk bagian tanggungjawab penanggung atau bukan.

#### **F. Prinsip kontribusi**

Apabila dalam suatu polis ditandatangani oleh beberapa penanggung, maka masing-masing penanggung itu menurut imbangan dari jumlah untuk mana mereka menandatangani polis, memikul hanya harga yang sebenarnya dari kerugian itu yang diderita oleh tertanggung. Prinsip kontribusi ini terjadi apabila ada asuransi berganda (*double insurance*) sebagaimana dimaksud Pasal 278 KUHD).

### **3. PERJANJIAN ASURANSI**

Suatu perjanjian dapat didefinisikan sebagai berikut:<sup>15</sup>

“Suatu hubungan hukum antara subjek-subjek hukum, maka sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang daripadanya mengikatkan dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap pihak lain”

Secara umum pengertian perjanjian dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih;
2. Suatu hubungan hukum antara pihak, atas dasar mana pihak yang satu (yang berpiutang/kreditor) berhak untuk suatu prestasi dari yang lain. (yang berhubungan/debitor) yang juga berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab atas suatu prestasi.

Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan sebutan “*alta'min*”, yaitu perjanjian antara dua pihak untuk menanggung risiko dengan memperoleh imbalan berupa premi, yang pada intinya merupakan pengalihan finansial untuk mengantisipasi berbagai bahaya yang mungkin terjadi. Perjanjian yang terjadi adalah antara pihak penanggung (perusahaan asuransi) dan pihak tertanggung (peserta asuransi) dimana terjadi konsep peralihan resiko dari tertanggung kepada penanggung.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanannya di Indonesia*, (Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2005), h. 22.

<sup>16</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Kencana Prenada, Jakarta), hal. 198-199.

Dalam Bahasa Belanda disebut pula “*Verzekering*” yang berarti asuransi atau juga pertanggungan. Ada dua pihak yang terlibat dalam Asuransi, yaitu: yang satu sanggup menanggung atau menjamin bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian yang mungkin ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula dapat ditentukan saat akan terjadinya. Suatu kontrak prestasi dari pertanggungan ini, pihak yang ditanggung itu, diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung. Uang tersebut, akan tetap menjadi milik pihak yang menanggung apabila kemudian ternyata peristiwa yang dimaksudkan tidak terjadi.<sup>17</sup>

Menurut Dewan Asuransi Indonesia:

Asuransi atau Pertanggungan di dalamnya tersirat pengertian adanya suatu risiko yang terjadi belum dapat dipastikan dan adanya pelimpahan tanggung jawab memikul beban risiko tersebut kepada pihak lain yang sanggup mengambil alih tanggungjawab. Sebagai kontra prestasi dari pihak lain yang melimpahkan tanggungjawab ini, ia diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menerima pelimpahan tanggung jawab.<sup>18</sup>

Dari pengertian di atas dapat bahwa dalam asuransi itu terdapat dua pihak yang terlibat. *Pertama*, adalah pihak yang mempunyai kesanggupan untuk menanggung atau yang menjamin yang selanjutnya disebut dengan “penanggung”. *Kedua*, adalah pihak yang akan mendapatkan ganti rugi jika menderita suatu musibah sebagai akibat dari suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi, yang selanjutnya disebut dengan pihak “tertanggung”.<sup>19</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang disebutkan bahwa:

---

<sup>17</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 1 *lihat pula* Djoko Prokoso dan I Ketut Murtika, (Bina Aksara, Jakarta), 1987, hal. 1.

<sup>18</sup> Dewan Asuransi Indonesia, *Perjanjian Asuransi dalam Praktek dan Penyelesaian Sengketa*, (Hasil Simposium Tentang Hukum Asuransi (Padang, BPHN, 1978)), h. 107

<sup>19</sup> Yadi Jamwari, *Asuransi Syariah*, (Pustaka Bani Quaraisy, Bandung, 2005), h. 2.



“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.<sup>20</sup>

#### **4. KEPAILITAN PADA PERUSAHAAN ASURANSI**

Sebagaimana halnya dengan bank dan perusahaan efek, Undang - Undang Nomor. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga membedakan perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan public dengan debitor lainnya. Jika debitornya perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Adanya perlakuan berbeda dari debitor lain ini karena lembaga ini mengelola dana masyarakat umum. Hal ini juga dilakukan demi untuk melindungi kepentingan masyarakat sehingga tidak semua orang bisa mempailitkan lembaga-lembaga tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, dalam hal tindakan pemberian peringatan dan pembatasan kegiatan usaha tidak berhasil dilakukan, Menteri Keuangan melakukan pencabutan ijin usaha perusahaan perasuransian tersebut. Dalam hal, Menteri Keuangan mencabut ijin usaha perusahaan perasuransian, sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam peraturan Kepailitan

---

<sup>20</sup> *Loc Cit, Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, Pasal 246*

baik Undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 maupun Undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Menteri Keuangan berdasarkan kepentingan umum dapat memintakan kepada Pengadilan Niaga agar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 terlihat bahwa otoritas untuk mempailitkan perusahaan asuransi ke Pengadilan Niaga hanya diberikan oleh undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 kepada Menteri Keuangan. Dalam hal perusahaan asuransi tersebut diajukan permohonan pailit, kekayaan perusahaan asuransi tersebut perlu dilindungi agar para pemegang polis tetap dapat memperoleh haknya secara proporsional. Untuk melindungi kepentingan para pemegang polis tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk meminta Pengadilan Niaga agar perusahaan asuransi yang bersangkutan dinyatakan pailit sehingga harta kekayaan perusahaan tidak dipergunakan untuk kepentingan pengurusan atau pemilik perusahaan tanpa mengindahkan kepentingan para pemegang polis.

Dari ketentuan di atas, terlihat bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 memberikan perlindungan kepada pemegang polis dengan kedudukan para pemegang polis dengan kedudukan yang utama dan lebih tinggi (preferen) dari kreditor lainnya. Selain itu, dalam kepailitan perusahaan perasuransian, Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mencegah berlangsungnya kegiatan yang tidak sah dari perusahaan perasuransian yang telah dicabut ijin usahanya tersebut dari kemungkinan terjadinya kerugian yang lebih luas pada masyarakat.

### **BAB III**

#### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

##### **1. Teori Kewenangan**

###### **a. Pengertian Kewenangan**

Untuk melaksanakan Fungsi Pemerintahan, Kekuasaan dan kewenangan sangatlah penting. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata “ Wewenang” Memiliki Arti :

- a) Hak dan Kekuasaan untuk bertindak
- b) Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain;
- c) Fungsi yang boleh dilaksanakan<sup>1</sup>

Sedangkan “kewenangan memiliki arti:

- 1) Hal berwenang
- 2) Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu<sup>2</sup>

Selain itu, Kekuasaan dalam KBBI memiliki Arti:

- 1) Kuasa ( Untuk mengurus, memerintah dan sebagainya)
- 2) Kemampuan; kesanggupan
- 3) Daerah (tempat, dsb) yang dikuasai
- 4) Kemampuan orang atau golongan, untuk menguasai orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan, karisma, atau kekuasaan fisik.

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan Pertama Edisi III, (Jakarta ; Balai Pustaka), h. 1272

<sup>2</sup> Ibid.h.1272

- 5) Fungsi Menciptakan dan memantapkan kedamaian, keadilan serta mencegah dan menindak ketidakdamaian atau ketidakadilan..<sup>3</sup>

Sedangkan Soerjono Soekanto menguraikan beda antara kekuasaan dan kewenangan bahwa” setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan kewenangan adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari Masyarakat.<sup>4</sup>

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam

lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (authority) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.

#### b. Jenis-jenis Kewenangan

Setiap perbuatan pemerintahan harus bertumpu pada suatu kewenangan yang sah. Tanpa disertai kewenangan yang sah, seorang pejabat ataupun lembaga

---

<sup>3</sup> Ibid., h. 604

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok – pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta ; Raja Grafindo Persada, 2003), h. 91 - 92

tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintahan. Oleh karena itu, kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun lembaga.

Berdasarkan sumbernya, wewenang dibedakan menjadi dua yaitu wewenang

personal dan wewenang resmi. Wewenang personal yaitu wewenang yang bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin. Sedangkan wewenang resmi merupakan wewenang resmi yang diterima dari wewenang yang berada di atasnya.<sup>5</sup>

Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi atau dengan pelimpahan wewenang.

a. Atribusi

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat Undang-Undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan.

b. Pelimpahan wewenang

---

<sup>5</sup> Diah Restuning Maharani, Teori Kewenangan, <file:///D:/konsep/teori-kewenangan.html>, 9 Januari 2011 (23.20)

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

Selain secara atribusi, wewenang juga dapat diperoleh melalui proses pelimpahan yang disebut:

i. Delegasi :

Pendelegasian diberikan biasanya antara organ pemerintah satu dengan organ pemerintah lain, dan biasanya pihak pemberi wewenang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak yang diberikan wewenang.

ii. Mandat :

Umumnya mandat diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dan bawahan. Dalam buku Lutfi Effendi, kewenangan yang sah jika ditinjau dari mana kewenangan itu diperoleh, maka ada tiga kategori kewenangan, yaitu atributif, mandat, dan delegasi.

a. Kewenangan Atributif

Kewenangan atributif lazimnya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara oleh UUD. Istilah lain untuk kewenangan atributif adalah kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada siapapun. Dalam kewenangan atributif, pelaksanaannya

---

<sup>6</sup> Ibid

dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan tersebut tertera dalam peraturan dasarnya. Adapun mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat ataupun pada badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

b. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas. Kemudian, setiap saat si pemberi kewenangan dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan tersebut.

c. Kewenangan Delegatif

Kewenangan delegatif merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan kewenangan mandat, dalam kewenangan delegatif, tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi limpahan wewenang tersebut atau beralih pada delegataris. Dengan begitu, si pemberi limpahan wewenang tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada azas *contrarius actus*. Oleh sebab itu, dalam kewenangan delegatif peraturan dasar berupa peraturan perundang-undangan merupakan dasar pijakan yang menyebabkan lahirnya kewenangan

delegatif tersebut. Tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pelimpahan wewenang tersebut, maka tidak terdapat kewenangan delegatif.<sup>7</sup>

Sementara menurut Philipus M. Hadjon, “Kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan atribusi atau dengan delegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan”<sup>8</sup>. Philipus menambahkan bahwa “Berbicara tentang delegasi dalam hal ada pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada. Apabila kewenangan itu kurang sempurna, berarti bahwa keputusan yang berdasarkan kewenangan itu tidak sah menurut hukum”.<sup>9</sup>

Dari pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa atribusi dan delegasi merupakan suatu alat atau sarana yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu badan itu berwenang atau tidak dalam memberikan kewajiban-kewajiban kepada masyarakat. Mengenai mandat, Philipus menyatakan “Dalam hal mandat tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalih-tanganan kewenangan. Di sini menyangkut janji- janji kerja intern antara penguasa dan pegawai. Dalam hal-hal tertentu seorang pegawai memperoleh kewenangan untuk dan atas nama si penguasa”.<sup>10</sup>

## **2. Kementerian keuangan**

---

<sup>7</sup> Lutfi Effendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Edisi pertama Cetakan kedua, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), h. 77-79

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan ketujuh (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), h. 130

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Ibid, h. 131



Di Indonesia banyak terdapat instansi pemerintahan. Salah satu instansi pemerintah yang sangat vital peranannya yaitu Kementerian Keuangan, disingkat Kemenkeu. Beberapa tahun yang lalu Kemenkeu bernama Departemen Keuangan, disingkat Depkeu.

Kementerian Keuangan membidangi masalah keuangan di Indonesia. Instansi pemerintah ini dipimpin oleh Menteri Keuangan (Menkeu). Saat ini Menkeu dijabat oleh Agus Martowadojo dan Anny Ratnawati sebagai Wakil Menteri Keuangan. Motto dari Kementerian Keuangan adalah *Nagara Dana Rakça* (Penjaga Keuangan Negara). Menteri keuangan adalah jabatan dalam pemerintahan negara yang berdaulat dengan tanggung jawab pada keuangan negara. Tugas khusus dari menteri keuangan adalah untuk menentukan anggaran keuangan negara, [kebijakan fiskal](#), dan mengontrol keuangan.<sup>11</sup>

Struktur organisasi Kementerian Keuangan di antaranya:

1. Sekretariat Jenderal
2. Inspektorat Jenderal
3. Direktorat Jenderal Anggaran
4. Direktorat Jenderal Pajak

Alamat kantor pusat Kemenkeu berada di Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 dan di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat. Kedua kantor ini merupakan area yang terdiri dari beberapa bangunan dan letaknya saling berseberangan.

### **3. Wewenang Menteri Keuangan**

---

<sup>11</sup> Ensiklopedia, kementerian Keuangan RI, [http://id.wikipedia.org/wiki/Menteri\\_keuangan](http://id.wikipedia.org/wiki/Menteri_keuangan). 9 Januari 2011,(23.30)

### Tugas menteri Keuangan

Menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan kekayaan negara dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

### Fungsi Menteri keuangan

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan kekayaan Negara;
2. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian keuangan;
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian keuangan;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian keuangan di daerah;
5. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid

## **BAB IV**

### **KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI (study Yuridis Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayar Utang (PKPU))**

#### **1. UNDANG – UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)**

Latar belakang lahirnya Undang – undang Nomor 4 Tahun 1998, tidak lain berkaitan dengan kondisi perekonomian pada masa itu. Pada satu sisi Indonesia membutuhkan kepercayaan dunia Internasional terhadap iklim bisnis Indonesia, dan di lain pihak para kreditor asing membutuhkan suatu aturan hukum yang cepat dan pasti bagi penyelesaian piutang-piutangnya pada berbagai perusahaan Indonesia yang sebenarnya berada dalam kondisi bangkrut. Apabila mengandalkan penyelesaian utang-piutang berdasarkan peraturan yang lama maka akan memakan waktu yang lama, berbelit-belit dan tidak menjamin kepastian hukum.

Undang – undang Nomor 4 Tahun 1998 memiliki perbedaan yang prinsipil dengan *Faillissement Verordening*. Perbedaan tersebut yaitu:

Undang – Undang No. 1 Tahun 1998 terdiri dari tiga bab yaitu;

- 1) Bab I : Tentang Kepailitan Pasal 1 s/d Pasal 211 perubahan 51 pasal.
- 2) Bab II : Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 212 s/d Pasal 279 perubahan 41 pasal.

- 3) Bab III : Tentang Pengadilan Niaga, Pasal 280 s/d Pasal 289 terdiri dari 10 Pasal Baru

Sedangkan *Faillissement Verordening Stb. 1905 No. 217 jo. Stb. 1906 No. 348* terdiri dari 2 bab yaitu:

- 1) Bab I : Tentang Kepailitan Pasal 1 s/d Pasal 211
- 2) Bab II : Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran utang (*surseance van betaling*) Pasal 212 s/d Pasal 279.

Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 ini terdiri atas 7 Bab yang berisikan 308 pasal yang uraiannya adalah sebagai berikut:

- 1) BAB I : Ketentuan Umum
- 2) BAB II : Kepailitan
- 3) BAB III : Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- 4) BAB IV : Permohonan Peninjauan Kembali
- 5) BAB V : Ketentuan Lain-Lain
- 6) BAB VI : Ketentuan Peralihan
- 7) BAB VII : Ketentuan Penutup.

Kedua Undang-Undang tersebut (Undang - undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Undang - undang Nomor 4 Tahun 1998) meskipun mengatur hal yang sama namun mengandung beberapa perbedaan mendasar terkait dengan keberadaan Undang - undang Nomor 37 Tahun 2004 sebagai penyempurna Undang - undang Nomor 4 Tahun 1998. Adapun beberapa perbedaan mendasar tersebut meliputi<sup>1</sup>:

---

<sup>1</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, (Sinar Grafika; Jakarta), h. 19

1. Istilah / Pengertian;
2. Syarat untuk dapat dinyatakan pailit;
3. Pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit;
4. Pengadilan yang berwenang;
5. Prosedur pengajuan permohonan pailit;
6. Prosedur di Pengadilan;
7. Upaya hukum;
8. Putusan pailit;
9. Pencabutan kepailitan;
10. Akibat-akibat kepailitan;
11. Actio Paulina;
12. Tingkatan kreditor;
13. Kepailitan suami atau istri;
14. Hakim pengawas;
15. Curator;
16. Panitia kreditor;
17. Rapat kreditor;
18. Tindakan-tindakan setelah pernyataan pailit;
19. Pencocokan piutang;
20. Perdamaian;
21. Pemberesan harta pailit;
22. Keadaan hukum debitor setelah berakhirnya pemberesan;
23. Kepailitan harta peninggalan;
24. Ketentuan-ketentuan hukum internasional;
25. Rehabilitasi;
26. Ketentuan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang;
27. Perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang;
28. Permohonan peninjauan kembali dan
29. Pengadilan Niaga.

Meskipun terdapat sebanyak 29 (dua puluh sembilan) perbedaan, itupun belum termasuk hal-hal yang bersifat substansi, namun dalam penulisan ini

hanya akan dibahas perbedaan-perbedaan pokok diantara kedua UU tersebut yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang akan dijawab atau lebih tepatnya yang berkaitan langsung dengan pengaturan asuransi maupun perusahaan asuransi dalam hubungannya dengan pengajuan permohonan kepailitan.

Pasal 2 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menunjukkan bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit bagi seorang debitor adalah :<sup>2</sup>

1. Debitor yang bersangkutan;
2. Kreditor atau para kreditor;
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum;
4. Bank Indonesia apabila debitornya bank;
5. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam hal kreditornya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
6. Menteri Keuangan dalam hal debitornya perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan public.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1-4) Undang - Undang Nomor 4 tahun 1998 bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit seorang debitor adalah:<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Undang –undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 2 ,*Loc cit*, h. 241

<sup>3</sup> Undang – undang Nomor 4 Tahun 1998, Pasal 2 (Ayat 1-4), *Op Cit*, h.9

1. Debitor yang bersangkutan;
2. Kreditor atau para kreditor;
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum;
4. Bank Indonesia apabila debitornya bank;
5. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam hal kreditornya perusahaan efek.

Dengan demikian, dalam Undang - undang Nomor 37 Tahun 2004 terdapat penambahan kewenangan pihak untuk mengajukan permohonan pailit yaitu Menteri Keuangan untuk perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan perasuransian, yang mana dalam UU sebelumnya hal ini tidak diatur.

Dalam hubungannya dengan permohonan pailit bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi, penjelasan Pasal 2 Ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan.<sup>4</sup> Ketentuan ini diperlukan dengan tujuan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi maupun perusahaan reasuransi sebagai lembaga pengelola resiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian Negara. Dengan demikian jelaslah bahwa pertimbangan diberikannya kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit pada perusahaan asuransi

---

<sup>4</sup> Undang -undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 2 (Ayat 5), *Op Cit*, h. 241

atau perusahaan reasuransi kepada Menteri Keuangan adalah mengingat betapa pentingnya fungsi dan kedudukan perusahaan tersebut sebagai lembaga pengelola dana masyarakat.

Mengingat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 mengatur beberapa hal yang begitu berbeda dari Undang-undang yang telah berlaku sebelumnya, maka tidak mengherankan jika menuai banyak perdebatan dari berbagai pihak yang berkepentingan, bahwa ditutupnya hak untuk mengajukan permohonan pailit bagi pemegang polis perusahaan asuransi, nasabah bank, peserta dana pensiun dan investor pasar modal serta hanya dimilikinya hak tersebut oleh Menteri Keuangan, Bapepam dan Bank Indonesia untuk debitor yang berada dibawah pengawasannya, telah menyimpang dari asas keseimbangan dalam hukum perjanjian, dimana dalam hukum perjanjian bahwa para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang pada dasarnya harus seimbang meskipun didalam prakteknya seringkali keseimbangan tersebut tidak dapat terlaksana.

Pembatasan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (5) Undang-undang Kepailitan semakin terasa arti pentingnya jika dikaitkan dengan Pasal 2 Ayat (1) bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.<sup>5</sup> Persyaratan untuk

---

<sup>5</sup>Ibid, h. 241



memohonkan pailit yang termuat dalam Undang-Undang terdahulu (Nomor 4 Tahun 1998) sangat longgar, sehingga seorang kreditor dengan mudah dapat mengajukan permohonan pailit hanya didasarkan pada utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Sutan Remy, Pakar Hukum Kepailitan dan juga Guru Besar Hukum Universitas Indonesia ini berpendapat bahwa persyaratan yang sangat longgar untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit merupakan kelalaian pembuat undang-undang dalam merumuskan Pasal 2 Ayat (1) jika dibandingkan misalnya dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) *Faillissement-Verordening*, (Staatsblad 05-217 jo 06-348) dimana keadaan tidak dapat membayar ternyata tidak terdapat dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang *a quo*. Dengan tiadanya persyaratan “tidak mampu membayar” maka kreditor dapat dengan mudah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap sebuah perusahaan asuransi tanpa harus membuktikan bahwa perusahaan asuransi itu dalam keadaan tidak mampu membayar.<sup>6</sup>

Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diatur dalam Pasal 2 Ayat 5 bahwa apabila sebuah Perusahaan Asuransi tidak dapat menjalankan kewajibannya, yaitu membayar Klaim yang disampaikan Oleh Nasabah Perusahaan Asuranssi, maka yang berwenang mengajukan Pernyataan Pailit Perusahaan Asuransi Tersebut adalah Menteri keuangan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Loc Cit* Sutan Remy Syahdeini.

<sup>7</sup> *Undang –undang Nomor 37 Tahun 2004*, Pasal 2 (Ayat 5), *Op Cit*, h. 241

Penulis Berpendapat bahwa aturan yang diberlakukan berdasarkan Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004,Pasal 2 Ayat 5, yang berhak mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi adalah Menteri Keuangan, dirasa tidak adanya Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban, karena Aturan yang dibuat itu sangat Merugikan Nasabah, disatu sisi Nasabah diwajibkan Membayar Premi, disisi lain apabila Klaim itu tidak dipenuhi, nasabah tidak punya hak untuk melaporkan atau Menyampaikan Permohonan Pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga, Melainkan Harus melalui Menteri Keuangan, memang sangat banyak sisi Positifnya bagi dunia usaha apabila aturan ini diberlakukan, karena sangat banyak Trik – trik yang dilakukan oleh kalangan dunia usaha untuk menafsirkan aturan ini, tetapi lebih dari pada itu, aturan ini bisa menjadikan Perusahaan Asuransi lebih bisa menghimpun dan memberdayakan dana dari masyarakat ini dan tidak ada trik untuk mempailitkan diri.

## **2. PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT OLEH KREDITOR PERUSAHAAN ASURANSI MELALUI MENTERI KEUANGAN**

Pendaftaran permohonan harus diajukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, yaitu: <sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Paulus A. Lotulung, dalam Buku *Hukum Kepailitan, Penyelesaian Utang Piutang*, di edit oleh Rudy A. Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto (Ed),( Pt. Alumni, 2001, Bandung), h. 157.

1. Permohonan harus diajukan oleh seorang penasehat hukum yang memiliki izin praktek.
2. Apabila diajukan oleh seorang debitor yang menikah, maka permohonan didasarkan atas persetujuan suami atau isterinya.
3. Wajib membayar Panjar Biaya perkara di Kepaniteraan sebagaimana lazimnya suatu perkara perdata.

Sebelum persidangan dimulai, pengadilan melalui juru sita melakukan pemanggilan para pihak, antara lain:<sup>9</sup>

- I. Wajib memanggil debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan;
- II. Dapat memanggil Kreditor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor (*voluntary position*) dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU telah terpenuhi;

Terkait dengan proses pengajuan permohonan kepailitan yang dilakukan oleh para pihak tersebut juga harus diperhatikan mengenai dokumen atau surat yang harus dipenuhi atau dilampirkan yaitu sebagai berikut:

1. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua / Pengadilan Negeri / Pengadilan Niaga.
2. Izin Pengacara / kartu pengacara.
3. Surat Kuasa Khusus.

---

<sup>9</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, Pt Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 87.

4. Akta Pendaftaran Perusahaan (Tanda Daftar Perusahaan) / yayasan / asosiasi yang dilegalisir (dicap) oleh kantor Perdagangan paling lambat 1 (satu) Minggu sebelum permohonan didaftarkan.
5. Surat Perjanjian utang atau bukti lainnya yang menunjukkan adanya utang.
6. Perincian utang yang tidak terbayar.
7. Nama serta alamat masing-masing kreditor / debitor.<sup>10</sup>

Prosedur Umum Permohonan Pernyataan Pailit ke Pengadilan Niaga adalah Permohonan pernyataan pailit dan pendaftarannya diajukan kepada Pengadilan melalui panitera Pengadilan Negeri, kemudian Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang, setelah adanya Putusan, dan Penggugat merasa keberatan, maka dapat dilakukan Permohonan Kasasi, Apabila Penggugat masih kurang puas atau keberatan dengan Putusan Hakim, maka dapat dilakukan Jalur Peninjauan Kembali (PK) dan pendaftarannya beserta bukti pendukung ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan pengajuan salinan permohonan Peninjauan Kembali dan salinan bukti pendukung kepada termohon Peninjauan Kembali, dan Pemeriksaan dan pemberian keputusan Mahkamah Agung terhadap Peninjauan Kembali.

Mengajukan permohonan pailit oleh kreditor kepada perusahaan asuransi melalui Menteri Keuangan adalah Kreditor atau Pemegang Polis Asuransi mengajukan permohonan tertulis kepada Biro Perasuransian Departemen

---

<sup>10</sup> Jono, *Ibid*, h. 90.

Keuangan RI, Dalam proses ini, pemohon akan meminta pendapat Hukum melalui Biro Perasuransian Departemen Keuangan RI, Biro akan melanjutkan permohonan kepada Menteri Keuangan.

Menteri Keuangan terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan secara seksama terhadap perusahaan asuransi yang dimohonkan pailit yaitu berupa serangkaian pemeriksaan terutama yang berhubungan dengan pembukuan dan laporan keuangan perusahaan asuransi yang dimohonkan pailit. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan asuransi yang bersangkutan masih memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran utang (solvent) dan memenuhi kewajibannya sebagai debitor kepada kreditornya. Apabila perusahaan asuransi tersebut berdasarkan penilaian masih sanggup melakukan pemenuhan kewajibannya maka permohonan pailit tidak akan dilanjutkan kepada Pengadilan Niaga, tetapi bila berdasarkan penilaian bahwa perusahaan asuransi tersebut tidak lagi mampu untuk melakukan pemenuhan kewajibannya (insolvent) maka permohonan pailit akan diteruskan oleh Menteri Keuangan kepada Pengadilan Niaga.<sup>11</sup>

Selanjutnya, apabila prosedur permohonan telah sampai ke pengadilan Niaga dan telah benar-benar dinyatakan pailit melalui putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka salah satu tahap penting dalam proses kepailitan adalah tahap insolvensi karena pada tahap inilah nasib debitor ditentukan. Apakah aktivitas usahanya akan berhenti Total yaitu hartanya akan dibagi sampai menutupi kewajiban pembayaran utang atau justru masih

---

<sup>11</sup> Jono, *Ibid*, h. 95

dapat berlanjut dengan diterimanya suatu rencana perdamaian atau restrukturisasi utang. Namun yang pasti adalah bila debitor telah dinyatakan insolvensi, maka berarti hartanya akan dibagi untuk menutupi kewajiban pembayaran utang terhadap kreditornya, meskipun hal ini tidak berarti bahwa bisnis perusahaan pailit tersebut tidak bisa berlanjut. Insolvensi berarti ketidakanggupan untuk memenuhi kewajiban financial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam bisnis atau dengan kata lain, telah terjadi kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asset yang dimiliki dalam waktu tertentu, Dalam Undang - Undang Kepailitan istilah Insolvensi diartikan sebagai keadaan tidak mampu membayar. Jadi insolvensi itu terjadi demi hukum jika perdamaian tidak membuahkan hasil dan harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh utang yang wajib dibayarkan . Secara procedural hukum positif, maka dalam suatu proses kepailitan, harta pailit dianggap berada dalam keadaan tidak mampu membayar jika:<sup>12</sup>

- 1) Dalam rapat verifikasi tidak ditawarkan perdamaian;
- 2) Jika perdamaian yang ditawarkan telah ditolak;
- 3) Pengesahan perdamaian tersebut dengan pasti telah ditolak.

Dalam prosedur pengajuan Permohonan Pailit perusahaan Asuransi yang memiliki Legal Standing adalah Menteri keuangan RI melalui Biro Hukum Perasuransian Departement Keuangan RI, pada dasarnya Prosedur Pengajuannya sama dengan apa yang dilakukan dengan Perseorangan ataupun

---

<sup>12</sup> Jono, *Ibid*, h. 50

Badan Hukum Lainnya yang tidak Termaktub dalam Pasal 2 Ayat 5 Undang – undang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu diatur semuanya didalam Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004. Menurut Penulis, Prosedur yang digunakan dalam Pengajuan Permohonan Pailit ini sangat berbelit – belit, yaitu semua berkas dipersiapkan dengan mengacu pada Syarat – syarat yang telah ditentukan oleh undang – undang, kemudian harus melalui menteri keuangan, dan dalam hal ini menteri keuangan hanya dalam hal pengajuannya saja, dan hal ini terkesan menyusahkan Nasabah Perusahaan Asuransi, sehingga bagi Nasabah yang Klaim Asuransinya sedikit tidak akan mau melakukan pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit, apalagi Nasabah-nasabah yang berada diluar Kota Besar.

### **3. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ASURANSI APABILA PERUSAHAAN ASURANSI TELAH DINYATAKAN PAILIT OLEH PERADILAN NIAGA**

Apabila suatu perusahaan asuransi telah benar-benar dinyatakan pailit, maka akibat yang pasti dari kepailitan itu adalah adanya kewajiban melakukan pembayaran utang kepada para kreditornya dan konsekuensi mengikatnya suatu perjanjian sebagai hukum yang berlaku secara *lex specialist* kepada para pihak yang menandatangani, sangat jelas iatur dalam Pasal 1383 KUHPerdara. Akan tetapi, walaupun polis bukanlah satu-satunya syarat pembuktian bahwa telah terkaitnya penanggung dengan tertanggung dalam suatu kontrak asuransi, kedudukan polis dalam asuransi tetap sangat penting karena dalam polis tersebutlah tercantum semua perikatan-perikatan yang telah disepakati dan

berlaku sebagai hukum bagi pihak yang berkontrak. Oleh sebab itu, debitor setiap waktu dapat memohon kepada pengadilan agar penundaan kewajiban pembayaran utang dicabut, dengan alasan bahwa harta debitor memungkinkan dimulainya pembayaran kembali dengan ketentuan bahwa pengurus dan kreditor harus dipanggil dan didengar sepatutnya sebelum putusan diucapkan. Selama penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung maka terhadap debitor tidak dapat diajukan permohonan pailit. Yang dimaksud dengan penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung adalah bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang belum berakhir.

Dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian Bab X Pasal 20 (a) Tentang Kepailitan dan Likuidasi dengan tegas diakui bahwa Undang -undang Kepailitan dapat diberlakukan pada aktivitas dunia perasuransian, artinya bahwa Pasal tersebut memungkinkan bagi kreditor suatu perusahaan asuransi, walaupun disisi lain permohonan kepailitan tersebut bisa juga diajukan oleh Menteri Keuangan apabila setelah Menteri Keuangan mencabut ijin usaha dari perusahaan asuransi tersebut, masih juga menimbulkan kekhawatiran perusahaan asuransi tersebut akan menimbulkan kerugian lebih lanjut pada para pemegang polis dan masyarakat luas.<sup>13</sup>

Dalam perjanjian asuransi, kewajiban pihak asuransi sebagai penanggung baru muncul dan wajib dipenuhi kepada tertanggung apabila kedua syarat yaitu jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut telah dipenuhi secara hukum. Dengan kata

---

<sup>13</sup> Undang – undang RI, *Undang – undang Perasuransian*[http://Undang-undang RI.com/undaang – undang Nomor 2 tahun 1992.html](http://Undang-undang.RI.com/undaang-undang%20Nomor%20tahun%201992.html), 13 Januari 2011 (17.20)



lain dapat dibenarkan kedudukan pihak penanggung sebagai debitor yang layak dimohonkan pailit apabila penanggung tidak membayar suatu kewajiban yang secara sederhana dapat dibuktikan telah memenuhi kedua persyaratan fundamental tersebut.

Perlu diketahui bahwasanya putusan pernyataan pailit tidak mengakibatkan debitor kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomen handelingsbevoegd*) pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya saja.

Kewenangan debitor itu selanjutnya diambil alih oleh kurator. Ketentuan tersebut berlaku sejak diucapkannya putusan pernyataan pailit. Kepailitan ini meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Sesudah pernyataan pailit tersebut maka segala perikatan yang dibuat debitor dengan pihak ketiga tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta pailit atau dapat menambah harta pailit. Oleh karena itu gugatan - gugatan yang diajukan dengan tujuan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit, selama dalam kepailitan, yang secara langsung diajukan kepada debitor pailit, hanya dapat diajukan dalam bentuk laporan untuk pencocokan atau rapat verifikasi. Segala tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Begitu pula mengenai segala eksekusi pengadilan terhadap harta pailit. Eksekusi pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah

dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan, kecuali eksekusi itu sudah sedemikian jauh hingga hari pelelangan sudah ditentukan, dengan izin hakim pengawas kurator dapat meneruskan pelelangan tersebut.

Apabila suatu perusahaan asuransi benar-benar telah dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan Niaga maka suatu konsekuensi yang nyata adalah bahwa perusahaan asuransi tersebut harus segera melakukan pemenuhan kewajiban terhadap kreditornya dan dalam hal pelaksanaan pemenuhan kewajiban pembayaran utang tersebut harus memperhatikan jenis kreditornya agar tidak merugikan pihak lain. Sebagaimana diketahui bahwa terdapat beberapa golongan kreditor seperti kreditor separati, preferen dan konkuren.

kreditor (Nasabah Asuransi) dari suatu perusahaan asuransi yang telah dinyatakan pailit masuk dalam kategori kreditor preferen (Kreditor Istimewa), Dengan demikian jika suatu perusahaan asuransi telah dinyatakan pailit maka nasabah pemegang polis asuransi dari perusahaan asuransi tersebut berhak mengajukan tuntutan pemenuhan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan asuransi yang bersangkutan melalui Pengadilan Negeri baik secara perdata maupun pidana.

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap nasabah perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit, tidak tertutup jalan untuk melakukan upaya hukum lain meskipun wewenang mengajukan permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan, namun jika pemegang polis mempunyai permasalahan, mereka bisa mengajukan gugatan melalui Departemen Keuangan atau Pengadilan Negeri dalam hal sengketa perdata atau pidana.

Disamping adanya hak kreditor (nasabah) perusahaan asuransi untuk melakukan gugatan perdata maupun upaya hukum pidana terhadap perusahaan asuransi yang telah dinyatakan pailit, Mengenai perlindungan hukum terhadap kreditor atau pemegang polis asuransi harus dilihat terlebih dahulu bahwa :

- I. Berdasarkan seluruh ketentuan yang ada dalam UU No. 37 Tahun 2004 maka harus dilihat terlebih dahulu apakah persengketaan antara kreditor dan debitor dapat didamaikan, jika kedua belah pihak tidak mau berdamai maka Kurator akan melakukan pemberesan harta kekayaan perseroan;
- II. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 dalam UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, maka nasabah pemegang polis mempunyai hak utama terhadap pembagian harta perseroan;<sup>14</sup>
- III. Pemenuhan hak kreditor, diambil dari sisa asset yang tersisa setelah seluruh kewajiban perseroan tertutupi. Jika lebih kecil, maka harus dibagi berdasarkan jenis kreditornya apakah kreditor preferen, separatis maupun konkuren.

Hal-hal lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi nasabah perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit adalah :<sup>15</sup>

- 1) Jika Direksi atau Komisaris melakukan penyelewengan terhadap asset kekayaan perusahaan asuransi, maka curator sebagai kuasa perusahaan asuransi harus mengusut Direksi atau Komisaris melalui Pengadilan Negeri;

---

<sup>14</sup> Undang – undang RI, Ibid,

<sup>15</sup> Jono, Loc Cit, h. 107

- 2) Tidak ada upaya hukum lain yang diatur selain dari aturan dalam Undang undang Nomor 37 Tahun 2004 selain melalui Pengadilan Niaga/Negeri baik dengan gugatan perdata seperti wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, maupun dengan tuntutan pidana seperti penipuan dan lain sebagainya.

Jika suatu perusahaan asuransi telah nyata-nyata mengalami insolvensi (keadaan tidak mampu membayar), maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang Asuransi, Menteri Keuangan akan memberikan sanksi :<sup>16</sup>

- 1) Berupa peringatan (warning letter), dengan menyarankan agar perusahaan asuransi yang bersangkutan dapat melakukan tindakan hukum untuk mengantisipasi keadaan tersebut dengan melakukan merger, konsolidasi maupun akuisisi untuk menyelamatkan perusahaan asuransi tersebut;
- 2) Pembatasan kegiatan usaha, artinya bahwa perusahaan tidak bisa menjual polis baru dan terhadap polis yang lama harus segera dibayarkan;
- 3) Pencabutan ijin usaha, terhadap sanksi ini menteri Keuangan tidak dapat mencabut ijin usaha karena belum ada dasar hukumnya (RUU masih dalam proses).
- 4) Terhadap sanksi-sanksi diatas maka perusahaan asuransi diwajibkan untuk membuat laporan kepada Menteri Keuangan baik secara triwulan (tiga bulan) maupun tahunan.

---

<sup>16</sup> Undang – undang RI, Op Cit



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

- 1) Aturan Permohonan Pernyataan Pailit Perusahaan Asuransi, penjelasan Pasal 2 Ayat 5 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan Pailit Bagi perusahaan asuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan dengan tujuan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi maupun perusahaan reasuransi sebagai lembaga pengelola resiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian Negara. Kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan adalah dimaksudkan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi sebagai lembaga pengelola resiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian.
- 2) Prosedur Permohonan Pernyataan Pailit perusahaan Asuransi adalah melalui Menteri Keuangan, Yaitu Kreditor atau Pemegang Polis Asuransi

mengajukan permohonan tertulis kepada Biro Perasuransian Departemen Keuangan RI, Dalam proses ini, pemohon akan meminta pendapat hukum melalui Biro Perasuransian Departemen Keuangan RI, Biro akan melanjutkan permohonan kepada Menteri Keuangan, bila berdasarkan hasil pemeriksaan debitor termohon benar-benar dalam keadaan insolven maka permohonan pailit dilanjutkan ke pengadilan niaga.

- 3) Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Asuransi setelah Perusahaan Asuransi dinyatakan Pailit adalah perlindungan hukumnya dapat melalui Pengadilan Negeri baik secara perdata maupun pidana serta mendapatkan haknya untuk memperoleh pembagian dari sisa asset perseroan setelah Kurator melakukan pemberesan harta kekayaan perusahaan asuransi yang bersangkutan.

## **B. Saran**

1. Kepada Pemerintah/ Pembuat Undang – Undang:
  - a. Kewenangan Menteri Keuangan dalam mengajukan permohonan kepailitan perusahaan asuransi tersebut perlu ditetapkan, tetapi juga dibuat aturan mengenai hak-hak para kreditor untuk mengajukan kepailitan perusahaan asuransi melalui Menteri Keuangan.
  - b. Harus ada ketentuan lain yang mengatur mengenai batas kewenangan Menteri Keuangan serta sanksi jika Menteri Keuangan

tidak mengajukan atau meneruskan permohonan kepailitan ke Pengadilan.

## **2. Kepada Pengusaha/ Masyarakat**

Harus memahami bagaimana prosedur pengajuan Permohonan Pailit, karena perusahaan asuransi sangat berbeda dengan Badan Usaha Lainnya, Oleh karena itu harus dilihat bagaimana Perjanjian dalam perasuransian tersebut, karena masih banyak cara yang digunakan untuk mempertahankan hak – hak nya sebagai Nasabah.



## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004,

A. Hasyimi Ali, *Pengantar Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002 h. 85.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan;Perusahaan; dan Asuransi*, PTAlumni, Bandung,2007.

Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 1 *lihat pula* Djoko Prokoso dan I Ketut Murtika, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Dewan Asuransi Indonesia, *Perjanjian Asuransi dalam Praktek dan Penyelesaian Sengketa*, Hasil Simposium Tentang Hukum Asuransi (Padang, BPHN, 1978).

Diah Restuning Maharani, *Teori Kewenangan*, <file:///D:/konsep/teori-kewenangan.html>.

Ensiklopedia,kementrianKeuanganRI,  
[http://id.wikipedia.org/wiki/Menteri\\_keuangan](http://id.wikipedia.org/wiki/Menteri_keuangan)

Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana Prenada, Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan Pertama Edisi III, (Jakarta ; Balai Pustaka)

Kartini Muljadi,*Actio Paulina dan Pokok-pokok tentang Pengadilan Niaga*, dalam: Rudhy A.Lontoh et.al, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.

Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika; Jakarta.

*Kitab undang-undang Hukum Dagang*, Redhbook Pubhlisher, 2008.

Lutfi Effendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Edisi pertama Cetakan kedua, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004)

Man Sastrawidjaja, dan Endang, *Hukum Asuransi*, Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian, Penerbit Alumni, Bandung, 2004.

Paulus A. Lotulung, dalam Buku *Hukum Kepailitan, Penyelesaian Utang Piutang*, di edit oleh Rudy A. Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto (Ed), Pt. Alumni, 2001, Bandung,

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan ketujuh (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001).

Retno Wulan Sutantio, “*Pengadilan Niaga, Kurator, dan Hakim Pengawas, Tugas, dan Wewenang*” , makalah pada seminar Perlindungan Debitor dan Kreditor dalam Kepailitan, UNPAD, 17 Okt. 1998.

Ricardo Simanjuntak, “Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan”, Dalam : Emmy Yuhassarie (ed.), *Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat pengkajian Hukum, Jakarta, 2005.

Shadia Share, *Pengertian Perusahaan* <http://syadiashare.com/pengertian-perusahaan.html>.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta; Rajawali.1985

\_\_\_\_\_, *Pokok – pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta ; Raja Grafindo Persada, 2003), h. 91 - 92

Subekti, *Kitab Undang – undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramitha, 2004.

Sutan Remy Syahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Faillissementsverordening juncto Undang-undang No.4 Tahun 1998*, Grafity, Jakarta, 2002

Sri Redjeki hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*.

\_\_\_\_\_, *Kapita Selektta Hukum Ekonomi*, CV Mandarmaju, Bandung, 2000.

Sudargo Gautama, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*, (1998), cet.1, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1998.

*Undang – undang 37 Tahun 2004*, Pasal 115. Redhbook Pubhlisher, 2008.

*Undang – undang Nomor 4 Tahun 1998*, Redhbook Pubhlisher, 2003

Uwes Fatoni, *Kewenangan dan Legitimasi*, 8 Januari 2011, <http://www.pengantarilmupolitik.blogspot.com>.

Yadi Jamwari, *Asuransi Syariah*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanannya di Indonesia*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2005, h. 22.